

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Otonomi daerah yang saat ini tengah bergulir di Indonesia merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut:

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintah Daerah**

Untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, (*Good Governance*) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik²

Good Governance atau yang sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan dari seluruh pemerintahan di dunia agar mampu mencapai tujuan bernegara. Namun demikian, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang sudah berjalan selama hampir dua dekade dirasa masih belum mampu mengakselerasi pencapaian tujuan bernegara, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut adalah belum terwujudnya *good governance* baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa tantangan utama yang terjadi pada hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia sampai dengan saat ini antara lain, keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional, lemahnya sistem informasi dan teknologi informasi yang digunakan, dan masih adanya sekat-sekat birokrasi. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Seiring

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 **Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah**

dengan meningkatnya kompleksitas urusan sektor publik, maka dukungan sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai sangat diperlukan untuk membantu kelancaran berbagai urusan publik. Sebagai contoh, diperlukan dukungan sistem informasi yang baik dalam layanan perizinan sehingga memudahkan dan mempercepat pemberian izin dan layanan kepada masyarakat, diperlukan juga dukungan sistem informasi dalam pengelolaan data keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangannya sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Banyak daerah di Indonesia belum dapat menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi yang andal sehingga masih banyak urusan di daerah yang belum di tata kelola dengan baik.

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (OPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Pemerintah Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan,

dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri tentang organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah ditingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, dalam Renstra tahun 2010-2014 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kerja meningkatkan tingkat Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Dari beberapa penelitian tentang variable-variabel yang

mempengaruhi SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siska Florida Simorangkir (2016)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan).	Implementasi SIMDA pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah dilaksanakan dengan baik dan berpengaruh nyata terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 4 kali berturut-turut sejak diterapkannya SIMDA.
2.	Mitami Dian (2013)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Signifikan Terhadap efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten Pangkep. Dinyatakan

			bahwa Output yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan sesuai dengan elemen laporan keuangan yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.
3.	Udi Kuncoro (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi yang baik dari para pegawai yang ada di pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan akan menghasilkan kinerja yang baik juga, dalam hal ini berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penerapan

			SIMDA yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
--	--	--	---

Sumber : Data dari Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi yang berbasis teknologi pada pemerintah daerah dapat membantu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan karena pengelolaannya yang tepat waktu, efektif, serta transparan dan dapat diperoleh atau diakses oleh pemakai Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Medan menggunakan Aplikasi SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi, yang relevan andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mendapat penilaian auditor dari pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) berupa opini audit. dalam rangka mengemban amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 maka Pemerintah Kota Medan memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yang

menggunakan uji tanda (*sign test*) dan *wilcoxon match pairs test* yang dibantu dengan *software SPSS*, dan 4 indikator variabelnya yaitu relevan, andal, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah ada, serta adanya fakta dan temuan-temuan baru sehingga dapat disusun sebuah teori, konsep, hukum, kaidah atau metodologi baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
3. Untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan juga adanya perbedaan sebelum dan setelah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2. Pemerintah Daerah

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah untuk selalu siap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu daerah dalam melaksanakan tugasnya

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya. Sekaligus, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Sistem dalam suatu institusi pemerintahan sangatlah penting, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Terdapat berbagai pendapat yang mendefinisikan definisi sistem.

Munte menyatakan bahwa:

Sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat dicapai.³

Disamping itu ada suatu pendapat lain mengenai definisi sistem, menurut Tata Sutabri menyatakan bahwa:

“Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut.”⁴

³ Mei Hotma Mariati Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama, Buku Satu: UHN, Medan, 2016, hal 1

⁴ Tata Sutabri, **Analisis Sistem Informasi**, Edisi Pertama: ANDI, 2012, hal 15

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem yang dituju. Suatu sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut: mempunyai komponen (components), mempunyai batas (boundary), mempunyai lingkungan (environmest), mempunyai penghubung/antar muka (interface) antar komponen, mempunyai masukan (input), mempunyai pengolahan (processing), mempunyai keluaran (output), mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal), mempunyai kendali (control), mempunyai umpan balik (feed back).

2.1.1.2 Pengertian Informasi

Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan Data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan.

Menurut Munthe:

Informasi adalah salah satu sumber daya bisnis, dimana setiap hari dalam bisnis arus informasi dalam jumlah yang sangat besar mengalir ke pengambil keputusan dan pemakai lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan internal dan ke pemakai eksternal seperti *customer, supplier* dan *stakeholder* yang tentu saja memiliki kepentingan terhadap perusahaan.⁵

2.1.1.3. Pengertian Manajemen

Manajemen telah didefinisikan dalam berbagai cara. Akan tetapi, untuk maksud kita manajemen kita pahami sebagai proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada operasional organisasi mereka untuk merencanakan, mengorganisasikan, memprakarsai, dan mengendalikan operasi. Mereka merencanakan dengan menetapkan strategi, tujuan dan memilih arah pindahan yang terbaik untuk mencapai apa yang direncanakan. Mereka mengorganisasikan tugas-tugas yang diperlukan untuk rencana operasional, menyusun tugas ini dalam kelompok yang homogen, dan menetapkan pendelegasian wewenang. Mereka mengendalikan prestasi kerja (*performance*) dengan menentukan norma-norma prestasi kerja dan menghindari penyimpangan terhadap norma atau standar tersebut.

Dalam buku Manajemen, Rusliaman Siahaa, et al. menyatakan bahwa:

Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan dengan menggunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,

⁵ Mei Hotma Mariati Munte , **Op.Cit**, hal 4

dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.⁶

Hasibuan menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”⁷

2.1.1.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Pada umumnya, apabila orang membicarakan sistem informasi manajemen yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjang pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut. Kini kalau orang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasanya mereka juga membayangkan suatu sistem komputer diciptakan. Inti pengertian sistem informasi manajemen di dalam organisasi telah ada sebelum perangkat komputer diciptakan. Inti pengertian sistem informasi manajemen konvensional tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi di antara manajer-manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Akan tetapi, tersedianya teknologi pengolahan data dengan komputer yang relatif murah sekarang dan

⁶ Rusliaman ,et al. **Manajemen:** Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UHN, Medan, 2016, hal 3

⁷Drs.H.Malayu S.P Hasibuan ,**Manajemen:Dasar Pengertian Dan Masalah**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta ,2014,hal 2

dimasa depan penggunaan komputer untuk menunjang sistem informasi manajemen tidak dapat dihindari lagi.

Definisi secara umum sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan serta sebuah basis data yang disebut database. Untuk dapat memahami arti sistem informasi manajemen, beberapa definisi yang dinyatakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut Munte mendefinisikan bahwa:

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang cenderung berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer (*computer base Information processing*) dengan mempertimbangkan informasi apa, untuk siapa, dan kapan harus disajikan.⁸

Sedangkan menurut Ahmadi Aidi mengungkapkan bahwa:

“Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa”.⁹

⁸ Mei Hotma Mariati Munte, *Op Cit*, hal 13

⁹ Ahmadi Aidi, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi Pertama, IN MEDIA, 2014, hal 10

Berikut ini dijelaskan karakteristik sistem informasi manajemen guna mendapatkan sinyal yang lebih dini tentang keberadaan dan kondisi sistem informasi manajemen di organisasi.

1. Sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat control saja. Meskipun demikian, sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan bagi staf yang sudah senior.
2. Sistem informasi manajemen di desain untuk memberikan laporan operational sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik.
3. Sistem informasi manajemen sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
4. Sistem informasi manajemen biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.
5. Sistem informasi manajemen biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi seperti forecasting
6. Sistem informasi manajemen juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi di bandingkan data-data dari luar organisasi
7. Sistem informasi manajemen biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah di persiapkan sebelumnya.

2.1.1.5 Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer

Sekarang ini, sistem informasi manajemen yang modern adalah sistem informasi yang terkomputerisasi. Maka suatu sistem informasi manajemen yang berbasis komputer (*computerbased management information system*) yang terdiri dari manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berkompeten. Ada beberapa alasan mengapa komputer merupakan perkakas yang sangat penting di dalam sistem informasi manajemen modern. Alasan yang pertama berkenaan dengan kemampuan komputer mengolah data. Perangkat otomatis ini dalam beberapa hal ternyata lebih unggul sebagai penyerap atau pencatat data jika dibandingkan dengan daya ingat manusia, sekalipun pengambilan keputusan dilakukan oleh manusia.

Nilai informasi yang dihasilkan dari penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen memang sulit untuk dihitung dengan uang. Akan tetapi, hal tersebut kiranya dapat membantu menetapkan pikiran nilai tersebut, yaitu *availability* (dapat diperoleh), *timeliness* (ketepatan waktu), *accuracy* (ketelitian), *completeness* (kelengkapan) dan *presentation* (penyajian).

2.1.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Teknologi informasi adalah suatu yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan

dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi computer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang didistribusikan di setiap OPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislatif dapat menggunakan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan

Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.2.1 Tujuan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Adapun tujuan penerapan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
2. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerimaan koneksitas jaringan SIMDA
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
4. Sebagai media awal bagi pelaksana e-governemen; dan
5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

2.1.2.2 Unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Adapun kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapisan struktur yaitu:

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintahan pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.1.3 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Program aplikasi komputer SIMDA adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membentuk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporan.

2.1.3.1 Peraturan Perundangan-Undangan Aplikasi SIMDA

Aplikasi SIMDA Keuangan didisain berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
3. UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
5. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tetang Rencana Kerja Pemerintah
7. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

8. PP Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
11. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
12. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
13. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah,
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006,
16. Permendagri 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus,
17. Permendagri 21 Tahun 2011,
18. Permendagri 32 Tahun 2011

2.1.3.2 Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Adapun produk pengembangan aplikasi SIMDA hingga saat ini ialah:

Table 2.1

Perkembangan Aplikasi SIMDA

1.	Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
4.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
5.	Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6.	Sub Aplikasi Gabungan Per Provinsi
7.	Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Sumber : Data yang diolah BPKP

2.1.3.3 Tahapan Implementasi SIMDA

Aplikasi SIMDA Perencanaan dibangun sebagai satu siklus yang utuh.

Agar dapat diimplementasikan secara optimal, berikut langkah-langkah yang disarankan:

1. Persiapan Substansi

- 1) Pastikan keselarasan antara RPJMD dengan Renstra, RKPD dengan Renja, RPJMD dengan RKPD, dan Renstra dengan Renja.
- 2) Pastikan keberadaan dokumen SSH dan ASB, serta kesesuaiannya dengan system requirements dalam aplikasi SIMDA Perencanaan.
- 3) Pastikan bahwa SSH dan ASB digunakan dalam penyusunan Renja.

- 4) Pastikan bahwa tiap Program di RPJMD telah ditetapkan OPD pelaksanaannya, dan tiap Kegiatan di Renja telah ditetapkan Sub-OPD Pelaksanaannya

2. Persiapan Teknis

- 1) Pastikan ketersediaan server untuk modul lima tahunan maupun modul tahunan.
- 2) Pastikan ketersediaan jaringan untuk proses input data.
- 3) Pastikan instalasi modul lima tahunan dan modul tahunan telah berhasil.
- 4) Pastikan telah didistribusikan username dan password untuk proses input data.

3. Lakukan proses input data Perencanaan Lima Tahunan

- 1) Lakukan input data-data parameter yang diperlukan
- 2) Lakukan input data proses RPJMD oleh OPD yang menjalankan fungsi perencanaan daerah, misal Bappeda/Bappeko
- 3) Lakukan input data proses Renstra oleh seluruh OPD di Pemda

4. Lakukan proses input data SSH dan ASB

- 1) Lakukan input data-data parameter yang diperlukan
- 2) Lakukan input data struktur SSH dan tarif SSH
- 3) Lakukan input data struktur ASB dan tarif ASB

5. Lakukan proses input data Perencanaan Tahunan

- 1) Lakukan input data-data parameter yang diperlukan, termasuk transfer data dari modul Lima Tahunan ke modul Tahunan.
- 2) Lakukan input data proses RKPD oleh OPD yang menjalankan fungsi perencanaan daerah, misal Bappeda/Bappeko
- 3) Lakukan input data proses Renja oleh seluruh OPD di Pemda
- 4) Lakukan input data proses Musrenbang
- 5) Lakukan input data proses Pokir DPRD
- 6) Lakukan input data proses Forum SKPD
- 7) Lakukan input data proses Forum RKPD
- 8) Lakukan input data proses PPA

2.1.3.4 Keunggulan dan Manfaat Penggunaan SIMDA

1. Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Terintegrasi

Aplikasi SIMDA dapat di implementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi menggunakan teknologi *multi user* dan teknologi client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan

pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan:

- 1) Pengendalian transaksi terjamin
- 2) Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- 3) Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan

3. *Transfer Of Knowledge.*

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal:

- 1) Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit
- 2) Penguasaan *business process* pengelolaan keuangan daerah, dan
- 3) Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah

Serta didukung dengan kantor perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelolaan keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses *transfer of knowledge* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah.

4. Kesiambungan pemeliharaan

Dengan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi BPKP maka pengembangan dan perbaikan aplikasi SIMDA masih terus dilakukan yang meliputi:

- 1) Penyempurnaan dan perbaikan aplikasi SIMDA mengikuti praktik pengelolaan keuangan terbaik
 - 2) Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian
 - 3) Penerimaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengimplementasikannya.
5. Mudah Digunakan

Aplikasi SIMDA menampilkan fitur-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini (output dokumen transaksi seperti : Surat Penyedia Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana, secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (output catatan akuntansi seperti buku jurnal, buku besar, dan laporan lainnya).

2.1.3.5 Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai Pelaksana SIMDA

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara)

pada level Satker. Khusus untuk administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi.

Proses transfer knowledge dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe counterpart. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari business process program aplikasi SIMDA Keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya troubleshooting. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan atau entitas, dengan diperolehnya laporan keuangan, maka diharapkan laporan keuangan bisa membantu dalam tujuan untuk menghindari analisa yang keliru dalam melihat kondisi suatu perusahaan atau entitas tertentu. Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan andal atau dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Disamping itu, laporan keuangan juga harus

disajikan dengan prinsip kehati-hatian atau konservatif dan lengkap. Sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Menurut Kasmir laporan keuangan adalah: **“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”**¹⁰.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Pengertian ini juga tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa:

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹¹

Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka pengguna sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan. Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap

¹⁰ Dr.Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 7

¹¹ Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus ke arah kolusi, korupsi dan nepotisme. Adapun unsur laporan keuangan pemerintah ialah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.4.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Adapun penjelasan dari keempat karakteristik laporan keuangan diatas adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila:

- a) **Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)**
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) **Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)**
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c) **Tepat waktu**
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) **Lengkap**
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) **Penyajian Jujur**
informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) **Dapat Diverifikasi (*verifiability*)**
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) **Netralitas**
informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunadn dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.¹²

2.1.4.2 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*unternational equity*). (SAP No 24 Tahun 2005).

¹² Erlina,et.al, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual**, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal 8-11

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.4.3 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo dalam buku Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa:

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship).
2. Untuk memberikan Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, sald neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional; dan
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi:
 - i. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
 - ii. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
 - iii. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi, serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
 - iv. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equity).¹³

¹³Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 2018, hal 57 -58

2.1.4.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (Perubahan SAL)

Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

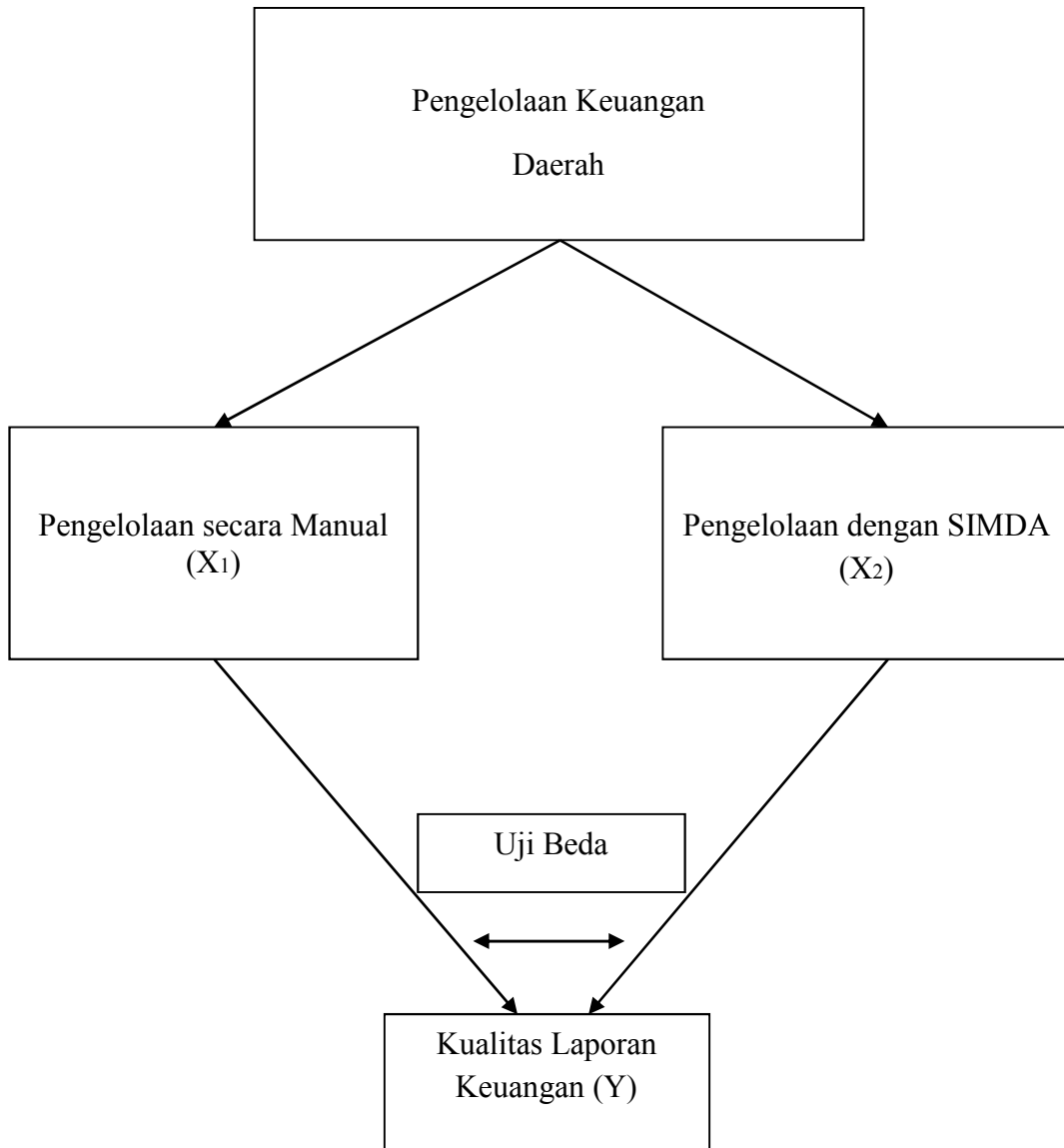
2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan amanat PP. No 56 Tahun 2005 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pemeangunan) merancang SIMDA Keuangan untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Menurut PP. No 71 Tahun 2010 tentang SAP mengenai kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa indikator laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintah yang baik yaitu meliputi keempat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan perbedaan antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan manual (X_1) dan pengelolaan menggunakan SIMDA (X_2). Untuk dapat menarik kesimpulan maka data diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji beda (statistika komparatif) sehingga

penulis dapat menarik kesimpulan kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan dengan dua perlakuan di atas.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Menurut William Chang:

“Hipotesis pada dasarnya merupakan sebuah gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai sebuah keterangan yang mengandung kemungkinan tentang suatu keadaan atau kondisi khusus”¹⁴.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat, ipotesis dalam penelitian kali ini adalah :

2.3.1 Adanya perbedaan kualitas laporan keuangan sebelum dan setelah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam

¹⁴ William Chang, **Metodologi Penulisan Ilmiah**, Erlangga, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2014, hal 123

penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha : Adanya perbedaan kualitas laporan keuangan yang signifikan sebelum dan setelah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

2.3.2 Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu variabel baik yang dibentuk sebagai variabel independen, variabel dependen, yang sesuai kebutuhan hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi kemudian ditarik kesimpulannya, variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negative, dalam *script analysis* akan terlihat bahwa variabel yang menjelaskan bahwa jalan atau cara sebuah masalah dipecahkan adalah tidak lain dari variabel-variabel independen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

X₁ = Pengelolaan secara Manual

X₂ = Pengelolaan dengan SIMDA

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah suatu tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel yang dijelaskan atau variabel dependen dalam penelitian ini

adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y), Kualitas Laporan Keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang sesuai dengan standar dan diukur dengan berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Y = Kualitas Laporan Keuangan (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses untuk terlibat dalam langkah-langkah logis. Pada penelitian terdapat dua pendekatan, yaitu melalui studi kualitatif dan kuantitatif, penelitian tersebut tergantung dari masalah apa yang akan dijadikan riset. Penelitian dilakukan dikarenakan dorongan untuk mengetahui sesuatu permasalahan dan sikap ketidakpuasan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Semua masalah yang ada nampaknya dapat diselesaikan melalui penelitian, baik penelitian yang sederhana atau yang lebih kompleks yang mencakup banyak aspek. Namun, sering kali dalam penelitian mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman dasar tentang penelitian.

3.1 Subjek Penelitian

Menurut Puguh :

“Subjek Penelitian, atau sering pula disebut unit analisis, adalah sebagai wahana yang merupakan sumber data, yang dapat memberikan data atau informasi bagi kegiatan penelitian”¹⁵.

Adapun subjek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Puguh :

¹⁵ Puguh Suharso, **Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis**, PT Indeks, Jakarta Barat, 2009, hal 3

Objek Penelitian adalah sesuatu yang mewakili data yang akan dianalisis melalui penelitian, dan biasanya disebut sebagai variabel penelitian yang harus diukur datanya dengan menggunakan skala tertentu¹⁶

Adapun objek penelitian ini adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan sebelum Implementasi SIMDA dan setelah Implementasi SIMDA.

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Alasan dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Medan yang bertempat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan. Merupakan pusat pemerintahan kota Medan.
2. Pemerintah Kota Medan merupakan instansi yang memegang kendali terhadap aplikasi SIMDA, sehingga lebih mengetahui terkait mengenai informasi aplikasi SIMDA tersebut.
3. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan merupakan tempat pengimplementasian aplikasi SIMDA.
4. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi dan peranan yang penting dalam memberikan pelayanan publik dalam hal penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
5. Lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis . selain itu penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah

¹⁶ Puguh Suharso, *Log.Cit*, hal 3

Kota Medan adalah karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan aplikasi SIMDA di kantor pemerintahan tersebut.

Oleh karena itu peneliti memilih tempat tersebut dengan didasarkan atas keinginan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintah Kota Medan

3.3 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data/informasi yang berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan persoalan atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan komparatif bersifat *ex post facto*. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis tentang implementasi SIMDA pada Pemerintah Kota Medan.

Komparatif *ex post facto* data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Untuk mendapatkan pengukuran kualitas laporan keuangan hasil keluaran (*output*) SIMDA yang akurat maka penulis menggunakan pengujian komparatif (uji beda). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan analisis statistika sebelum dan sesudah implementasi SIMDA. Pengukuran dilakukan dengan Skala Likert (*likert Scale*), Juliansyah Noor menyatakan bahwa : **“Skala Likert Summated Ratings merupakan teknik mengukur sikap dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan”**.¹⁷ Dimana pengukurannya terdiri dari 5 jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

¹⁷ Dr. Juliansyah Noor, S.E, M.M. **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2011, hal 128

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

1. Populasi penelitian

Menurut Puguh suharso dalam buku metodologi penelitian kuantitatif untuk bisnis mengemukakan bahwa populasi ialah:

“Seluruh elemen penelitian biasanya dapat berupa orang, produk, lembaga, industri, dan sebagainya. Penelitiannya biasanya disebut sebagai penelitian sesnsus.”¹⁸

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Pemerintah Kota Medan. Adapun jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 118 populasi.

3.4.2 Sampel

Menurut Puguh suharso dalam buku metodologi penelitian kuantitatif untuk bisnis mengemukakan bahwa sampel ialah: **“Suatu himpunan bagian dari populasi yang anggotanya disebut sebagai subjek, sedangkan anggota populasi adalah elemn”.**¹⁹ Adapun teknik yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian sampel adalah pegawai yang sudah mengalami dua perlakuan yaitu sebelum implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan setelah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Pemerintah Kota Medan.

¹⁸ Puguh Suharso, **Op.Cit** , hal.56

¹⁹ Puguh Suharso, **Log.Cit** , hal.56

Dengan demikian maka kriteria sampel penelitian ini adalah:

1. Seluruh pegawai/staf yang sudah bekerja minimal 1 tahun sebelum implementasi SIMDA atau pegawai yang minimal menjabat 10 tahun pada Pemerintah Kota Medan.
2. Seluruh pegawai/staf yang menjadi operator SIMDA dan memahami SIMDA
3. Seluruh pegawai/staf yang sudah melaksanakan pelatihan pengoperasian SIMDA.

Berdasarkan analisis jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan, maka jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria pada penelitian ini untuk setiap bidang adalah:

1. Kepala BPKAD	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Sub Bagian Umum	: 5 orang
4. Sub Bagian Keuangan	: 5 orang
5. Sub Bagian Penyusunan Anggaran	: 5 orang
6. Bidang Akuntansi	: 5 orang
7. Sub Bidang Akuntansi	: 5 orang
8. Sub Bidang Pelaporan	: 5 orang

Dengan demikian total seluruh sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang

3.5 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Sumber Data

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (Angket penelitian) kepada objek yang akan diteliti.

Menurut Puguh:

“Angket (*kuesioner*) adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden terpilih, dan merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian.”²⁰

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner karena teknik ini dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dikirimkan kepada para OPD yang bekerja di Pemerintah Kota/Medan. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri secara langsung oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembalian (*responserate*) kuesioner bisa lebih tinggi.

Gambar 3.1

Skala Likert

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

Sumber: Sugiyono, 2014

Alat ukur dalam penelitian ini terdiri dari :

1. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan

Alat ukur SIMDA Keuangan merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Alat ukur dibuat sendiri oleh peneliti dengan dimensi atau aspek-aspek yang

²⁰ Puguh Suharso, *Ibid*, hal 89

ada. SIMDA Keuangan ini diukur dari ketersediaan komputer, tersedianya software, tersedianya jaringan internet, dan sistem akuntansi SKPD.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Alat ukur Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari beberapa indikator, diantaranya: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Menggunakan angket yang berupa pertanyaan yang memiliki lima pilihan alternatif jawaban yaitu tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Untuk jawaban sangat tidak setuju maka akan diberikan skor 1, untuk pilihan jawaban tidak setuju diberi skor 2, untuk pilihan jawaban ragu-ragu diberikan skor 3, untuk pilihan jawaban setuju diberikan skor 4 dan untuk jawaban sangat setuju diberikan skor 5.

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Menurut Juliansyah Noor **“Variabel penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”**.²¹

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel mandiri (satu variabel), dimana variabel tersebut berada pada populasi dan sampel yang sama yang mengalami dua perlakuan yaitu sebelum implementasi SIMDA dan setelah implementasi SIMDA, dalam penelitian ini yang menjadi variabel mandiri (tunggal) adalah karakteristik kualitas laporan keuangan. Adapun kriteria karakteristik kualitas laporan keuangan ialah:

1. Relevan adalah laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

²¹Juliansyah Noor, **Op.Cit** hal 48

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal adalah informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materal, penyajian secara jujur dan dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan adalah informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya.
4. Dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Adapun operasional variabel penelitian ditunjukkan pada tabel 3.1 diawah ini.

Tabel 3.1

Oprasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	Sebelum Implementasi SIMDA (Sistem Manual)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat dipahami	Ordinal (STS, TS, N, S, SS)	Kuesioner
	Setelah Implementasi aplikasi SIMDA	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan		

		4. Dapat Dipahami		
--	--	-------------------	--	--

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

3.7 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.7.1 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pengukuran kualitas laporan keuangan hasil keluaran (*output*) aplikasi SIMDA dengan model pengujian komparatif. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif yaitu suatu analisis yang menggunakan rumus statistika berupa uji tanda (*sign test*) dan *wilcoxon match pairs test* . untuk keperluan analisis ini, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pertanyaan dan menggunakan skala *linkert* yang berskala oerdinal. Adapun kategori dan bobot penilaian jawaban dari kuesiner tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2

Penggunaan Skala Pengukuran Dalam Kuesioner

Notasi	Nilai	Keterangan
Sangat Setuju (SS)	5	Jawaban apabila responden sangat setuju dengan pernyataan kuesioner
Setuju (S)	4	Jawaban apabila responden setuju dengan pernyataan

		kuesioner
Netral	3	Jawaban apabila responden dengan pernyataan kuesioner
Tidak Setuju (TS)	2	Jawaban apabila responden tidak setuju dengan pernyataan kusioner
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	Jawaban apabila responden sangat tidak setuju dengan pernyataan kuesioner

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

Setelah diperoleh hasil data dari kuesioner maka peneliti akan menghitung pengujian variabel dengan analisis komparatif yaitu uji tanda (*sign test*) dan *wilcoxon match pairs test* dibantu dengan menggunakan *software* statistika yaitu program *SPSS*.

3.7.2 Pengujian Validitas dan Realibilitas Instrument

3.7.2.1 Uji Validitas

Puguh mengungkapkan bahwa:

Validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesahihan) ukuran suatu instrument terhadap konsep yang diteliti. Suatu instrument adalah tepat untuk digunakan sebagai ukuran suatu konsep jika memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sebaliknya, validitas rendah mencerminkan bahwa instrument kurang tepat untuk diterapkan.²²

²² Puguh Suharso, *Op.Cit*, hal 108

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel. Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* Rumus Uji validitas adalah sebagai berikut :

$$r_{\text{tabel}} = \frac{t_{\text{tabel}}}{\sqrt{df - t_{\text{tabel}}^2}}$$

Keterangan

df = *degree of freedom* ($v=n-2$)

n = Banyaknya Sampel

t_{tabel} = nilai quantil

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah :

- a. Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka kuisoneer valid
- b. Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel, maka kuesioner tidak valid.

Kesimpulan akhir bahwa dinyatakan tidak valid jika r kritis dibawah 0,3

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Puguh Suharso mengungkapkan bahwa:

Keandalan suatu instrument menunjukkan hasil pengukuran dari suatu instrument yang tidak mengandung bias atau bebas dari kesalahan pengukuran (*error free*), sehingga menjamin suatu pengukuran yang konsisten dan stabil (tidak berubah) dalam kurun waktu dan berbagai *item* atau titik (*point*) dalam onstrumen.²³

Pengujian realibilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan *test-retest (stability)*, *equivalent*, dan gabungan keduanya. Secara internal realibilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada *instrument* dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas dengan *internal consistency*, dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman Brown (*Split Half*), KR 20, KR 21 dan *Anova Hoyt* . Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang termasuk dalam kategori valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Split Half Method*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,60.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian dilakukan model uji beda yang menguji satu sampel yang berkorelasi (berhubungan) dan datanya berbentuk ordinal. Dengan demikian uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ini adalah statistika non parametrik yang tidak mengharuskan melakukan pengujian asumsi klasik. Adapun uji yang dipakai pada sampel yang berkorelasi pada uji komparatif ini adalah uji tanda (*sign test*) dan *wilcoxon pairs test*.

3.7.3.1 Uji Tanda (*Sign Test*)

²³ Puguh Suharso, **Ibid**, hal 106

Uji tanda (*Sign Test*) digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi, Bila datanya berbentuk ordinal. Teknik ini dikatakan uji tanda (*Sign Test*) karena data yang akan dianalisis dinyatakan dalam benyuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif.

Menurut Muri Yusuf menyatakan bahwa :

Uji Tanda ini sesuai dengan namanya, menggunakan tanda plus (+) dan tanda negatif (-) yang didapat dari hasil pengamatan selama eksperimen. Apabila nilai X lebih besar dari Y diberi tanda positif, dan apabila nilai x lebih kecil dari Y diberi tanda negatif. Apabila nilai X sama dengan Y, SAMPEL ITU DIABAIKAN.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menguji sampel di uji dengan *treatment* (perlakuan) yang lebih dari satu kali yaitu sebelum dan sesudah melakukan pengembangan SIMDA. Namun teknik ini tidak dapat memberikan seberapa besar pengaruhnya secara kuantitatif hanya tanda positif dan negatif, sehingga masih diperlukan teknik pengujian lainnya yang dapat mendukung pengujian hipotesis ini.

3.7.3.2 Wilcoxon Match Pairs Test.

Wilcoxon Match Pairs Test adalah alat uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif (uji beda) bila datanya berskala ordinal (ranking) pada dua sampel yang berhubungan (*related*). Uji ini merupakan uji alternatif dari uji t berpasangan (*Paired t test*), jika syarat uji t berpasangan tidak terpenuhi maka uji ini merupakan uji analisis untuk menjawab hipotesis data yang kita miliki. Dalam penelitian ini menggunakan satu sampel namun diberi *treatment* (perlakuan) lebih dari satu kali. Dimana sampel yang sama diberi kuesioner dengan perlakuan yang berbeda sesuai dengan penelitian ini yaitu sebelum pengembangan SIMDA dan

²⁴ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan**, KENCANA, Edisi Pertama, Jakarta, 2014, hal 281

setelah pengembangan SIMDA. Rumus teknik *Wilcoxon Match Pairs Test* yang digunakan adalah:

$$Z = \frac{T - \left[\frac{1}{4N(N+1)} \right]}{\sqrt{\frac{1}{24N(N+1)(2N+1)}}$$

Keterangan:

N = Banyaknya data yang berubah setelah perlakuan berbeda

T = - jumlah ranking dari nilai selisih yang negatif

- jumlah ranking dari nilai selisih yang positif

Syarat mengambil kesimpulan :

- 1) Bila Z hitung $>$ atau $=$ Z tabel, maka terima H0 tolak Ha.
- 2) Bila Z hitung $<$ Z tabel, maka tolak H0 terima Ha.